

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari suatu perbandingan dan selanjutnya digunakan dalam menemukan inspirasi yang baru untuk penelitian yang diteliti, di samping itu penelitian terdahulu membantu penulis dapat memposisikan penelitiannya serta menunjukkan keorisinilan (*originality*). Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai tolak ukur dan standar penulis dalam melakukan penulisan dan menganalisis penelitiannya yang telah dilakukan. Beberapa penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi sosial dan kesejahteraan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut tentu saja sangat membantu penulis dalam mengamati dan memperdalam pemahaman penulisan dalam melakukan penelitian ini. Ringkasan dari hasil *review* penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode
1.	(Isranita <i>et al.</i> , 2017)	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan	mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan.	Metode sampling jenuh atau sensus. Analisis deskriptif kualitatif
2.	(Fitria & Pinem, 2012)	Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang	untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi dan pendidikan anak nelayan di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.	Metode Pengumpulan data komunikasi tidak langsung Analisis Deskriptif
3.	(Utomo & Firdaus, 2019)	Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong	Untuk mengetahui gambaran kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang aktivitas sebagai nelayan.	Metode Deskriptif Kuantitatif
4.	(Kour <i>et al.</i> , 2020)	Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan Halmahera Utara	untuk menganalisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan dengan menggunakan analisis deskriptif dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).	Metode Deskriptif Kuantitatif

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode
5.	(Dewi Fatmasari, 2014)	Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon	Menganalisa kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon	Metode Deskriptif Kuantitatif
6.	(M. Imron, 2003)	Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan	Untuk mengetahui penyebab kemiskinan masyarakat nelayan	Metode Deskriptif
7.	(Manggabarani, 2016)	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene)	Untuk mengetahui kondisi social yang terdiri dari aspek Pendidikan, keragaman pekerjaan, akses kesejahteraan.	Metode Deskriptif
8.	(Vibriyanti, 2014)	Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah	Untuk mengetahui kondisi kehidupan nelayan tangkap kota Tegal dari aspek sosial, ekonomi, dan historis	Metode Deskriptif
9.	(Ndakularak <i>et al.</i> , 2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat	Metode Kuantitatif

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode
		Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	
10.	(Aldi R.H. <i>et al.</i> , 2019)	Karakteristik Dan Pola Kampung Nelayan	Untuk mengidentifikasi Karakteristik Dan Pola Kampung Nelayan	Metode literatur review

Sumber : (Data Sekunder Diolah, 2022)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Desa Nelayan

Desa nelayan adalah sarana tempat tinggal bagi nelayan untuk menjalani masa hidupnya yang berfungsi sebagai kebutuhan dasar. Biasanya lokasi rumah nelayan dekat sekali dengan mata pencaharian pokok tempat berusaha yaitu sungai atau pantai. Desa nelayan adalah bagian permukiman yang kurang terencana, karakteristik dan stratifikasi nelayan yang terpetakan secara sosiologis terdiri dari kelompok atas (juragan), menengah (pemilik) dan bawah (buruh), kelompok buruh merupakan mayoritas kurang mampu (Abdullah, 2000).

Desa nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman yang dihuni oleh masyarakat dengan pola kerja yang homogen, yaitu bermata pencaharian di bidang usaha perikanan laut. Keadaan perumahan dan permukiman masyarakat nelayan kurang memadai. Struktur masyarakat nelayan secara umum merupakan struktur dua kelas atau dua lapisan, yaitu juragan dan nelayan kecil. Kehidupan masyarakat nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam (musim) dan faktor ekonomi (Raharjo, 2014).

Desa nelayan adalah desa yang muncul karena adanya pola perilaku yang sama yaitu mayoritas menggantungkan penghasilan dari hasil melaut. Banyak

kajian yang menjelaskan bahwa para nelayan menjadikan Laut sebagai faktor dominan untuk mendapatkan penghasilan, namun pekerjaan nelayan yang bersifat musiman menyebabkan para nelayan memiliki penghasilan alternatif dari sektor lain, baik yang berhubungan dengan laut ataupun tidak. Budaya kaum nelayan memberikan Karakteristik pada bentuk hunian tunggal maupun dalam skala Desa. Beberapa kajian menunjukkan bentuk hunian tunggal dari kaum nelayan mencerminkan sebuah kebutuhan, serta adaptasi dengan alam sebagai bentuk tanggap bencana. Hunian tunggal nelayan memiliki ciri adanya sebuah beranda yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga ataupun sebagai tempat untuk memperbaiki jaring dan gudang yang berfungsi untuk menyimpan peralatan. Desa nelayan berorientasi pada laut, serta dalam fasilitas Desa adalah tersedianya tempat tambatan kapal untuk pemberhentian kapal, serta tersedianya tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk memfasilitasi transaksi jual beli hasil melaut. faktor penunjang lain yang menjadi pendukung kehidupan Desa yaitu infrastruktur dan fasilitas umum, Infrastruktur terkait dengan Jalan, drainase, air bersih, dan listrik, sedangkan fasilitas umum terdiri dari sekolah dan tempat ibadah. Keterkaitan komponen Desa menjadikan sebuah identitas dari suatu Desa nelayan (Aldi R.H. *et al.*, 2019).

Desa paciran adalah salah satu desa pesisir yang terletak di kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Terdapat tiga dusun di desa Paciran, diantaranya adalah dusun Penanjan, dusun Jetak, dan dusun Paciran. Dari ketiga dusun, hanya dusun Penanjan yang kebanyakan masyarakatnya memilih bekerja sebagai petani. Kehidupan masyarakat desa Paciran tidak bisa dipisahkan dengan letak keberadaan desanya yang bersebelahan langsung dengan laut Jawa, letaknya yang langsung

berhadapan dengan laut membuat masyarakat desa Paciran khususnya di dusun Jetak dan dusun Paciran kebanyakan memilih bekerja sebagai seorang nelayan. Walaupun sektor pariwisata dan sektor industri sudah mulai masuk di desa Paciran, namun hal tersebut tidak membuat jumlah nelayan di desa Paciran berkurang.

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang mempunyai karakteristik sosial yang tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan, di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir lautan. Sejak dahulu sampai sekarang nelayan telah hidup dalam suatu organisasi kerja secara turun-temurun tidak mengalami perubahan yang berarti. Kelas pemilik sebagai juragan relatif kesejahteraannya lebih baik karena menguasai faktor produksi seperti kapal, mesin alat tangkap maupun faktor pendukungnya seperti es, garam dan lainnya. Kelas lainnya yang merupakan mayoritas adalah pekerja atau penerima upah dari pemilik alat produksi dan walaupun mereka mengusahakan sendiri faktor atau alat produksinya masih sangat konvensional, sehingga produktifitasnya tidak berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan (Yanggi, 2013).

Keluarga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan dengan rumah tangga pertanian. Keluarga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan lautan sebagai faktor produksi, adanya ketidakpastian penghasilan. Selain itu pekerjaan menangkap ikan adalah

merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan umumnya karena itu hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki, hal ini mengandung arti anggota keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh (A. Imron, 2012).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, isu yang selalu dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga adalah bagaimana individu-individu yang ada di dalamnya harus berusaha maksimal dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kelangsungan hidupnya terpelihara. Setiap anggota keluarga harus memiliki kemauan untuk mencari nafkah, betapapun kecilnya perolehan nafkah itu. Anggota-anggota dalam keluarga juga memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup keluarga di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Setiap anggota rumah tangga bisa memasuki beragam pekerjaan yang dapat diakses sehingga memperoleh penghasilan yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup bersama (Kusnadi, 2002).

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat pesisir di Desa Paciran dan jumlah populasi masyarakat nelayan masih tergolong banyak dan cenderung meningkat di daerah pesisir dikarenakan sistem pekerjaannya yang turun temurun dari generasi ke generasi. Penghasilan dari bekerja sebagai nelayan yang serba tidak menentu karena bergantung dari hasil tangkapan setiap turun kelaut tentunya membuat nelayan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ditambah lagi dengan adanya pelabuhan di desa Paciran yang tentunya banyak kapal-kapal besar melintas di kawasan laut Paciran yang menjadi ancaman tersendiri bagi para nelayan yang menggunakan perahu kecil yang sewaktu-waktu bisa di tabrak kapal besar yang melintas, serta keadaan perairan laut disekitar desa Paciran yang sekarang sudah mulai tercemar dengan

adanya limbah pabrik di sekitar laut Paciran dan sampah rumah tangga yang tentunya bisa mengganggu ekosistem ikan yang bisa berpengaruh pada pengurangan dan minimnya hasil tangkap nelayan di desa pesisir tersebut. Sementara mereka harus menghidupi dan mencari nafkah untuk anggota keluarga seperti istri serta anak-anak mereka dan ditambah kebutuhan akan kesehatan bagi keluarga dan juga pendidikan bagi anakanak mereka. Jika dihitung dengan pendapatan nelayan di desa Paciran yang minim dan serba tidak menentu tentu saja hal tersebut sulit bisa terwujud. Hal ini tentunya berakibat buruk bagi nelayan di desa Paciran karena ditengah pendapatan nelayan yang minim, para nelayan dituntut untuk berjuang keras memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup ditengah mahalny biaya hidup, hal ini membuat masyarakat nelayan menempuh berbagai cara untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi kemiskinan ditengah himpitan ekonomi yang serba kekurangan.

Jumlah penduduk desa Paciran kurang lebih sekitar 14.728 jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7.018 jiwa (47,65%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 7.710 jiwa (53,35%). Jumlah penduduk tersebut didominasi oleh kelompok usia kerja atau usia produktif yaitu umur 15-65 tahun (75,64%). Keragaman penduduk di desa Paciran secara lengkap disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Berdasarkan Jenis Kelamin & Umur

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	0 – 9 tahun	2489	16,89
2.	10 – 19 tahun	1943	13,19
3.	20 – 29 tahun	2077	14,10

Lanjutan Tabel 2.2

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
4.	30 – 39 tahun	2522	17,12
5.	40 – 49 tahun	3050	20,71
6.	50 – 59 tahun	2572	17,46
7.	60> tahun	193	1,31
Jumlah		14.728	100

Sumber : (Data Statistik Kecamatan Paciran, 2020).

2.2.2 Nelayan

Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dan panjang pantai 81.791 km, menjadikannya pantai terpanjang di dunia. Indonesia, wilayah tropis dengan perairan laut di sepanjang pantai, kaya akan keanekaragaman hayati, antara lain hutan bakau, terumbu karang, ikan, mamalia, dan berbagai jenis moluska (kerang). Semua sumber daya alam laut ini merupakan salah satu aset terpenting bagi pembangunan negara (Sugandhy, 2008).

Masyarakat pesisir merupakan bagian integral dari pembangunan ini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas, dengan perkiraan 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir. Pada tahun 2000, terdapat 42 kota besar, 181 kabupaten dan 9261 desa (Dahuri, 2004).

Desa nelayan pesisir merupakan daerah yang berpotensi miskin. Kelompok nelayan Indonesia merupakan kelompok yang kesejahteraan ekonominya jauh tertinggal dari kelompok pertanian. Kehidupan masyarakat nelayan selalu identik dengan keterbelakangan, baik dari segi mata pencaharian maupun dari sudut pandang dan sikap tradisional. Sebagian besar masyarakat pesisir Indonesia berprofesi sebagai nelayan yang diturunkan secara turun temurun. Nelayan perlu

bergerak untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, karena karakteristik komunitas nelayan dibentuk sesuai dengan dinamika sumber daya yang mereka garap. Selain itu, risiko usaha yang tinggi berarti bahwa masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang senantiasa diwarnai dengan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Sabenan, 2007).

Terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Desa Paciran merupakan salah satu desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Seperti nelayan Pantura, nelayan tradisional di Desa Paciran sulit lepas dari kemiskinan dan jebakan yang kurang berkembang akibat keterbatasan alat tangkap.

Rumah tangga nelayan memiliki karakteristik seperti menggunakan wilayah pesisir dan wilayah laut (milik daerah) sebagai faktor produksi, dan jam kerja harus sesuai dengan kondisi laut (rata-rata sekitar 20 hari sebulan di laut). Memancing juga merupakan pekerjaan yang berbahaya, sehingga pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Artinya keluarga lain tidak dapat membantu sepenuhnya. Sejak tahun 1980 telah banyak dilakukan penelitian tentang kehidupan sosial ekonomi rumah tangga nelayan di desa-desa pesisir. Akibatnya, pendapatan rumah tangga nelayan yang mengabdikan diri untuk menangkap ikan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika uang masih tersisa, biasanya digunakan untuk biaya sekolah anak, pembelian pakaian, dan perbaikan rumah. Hasil survei dari berbagai komunitas nelayan di luar negeri menunjukkan bahwa organisasi sosial ekonomi dan instansi terkait lainnya di desa pesisir berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan kata lain, organisasi sosial ekonomi dapat mendukung upaya peningkatan taraf hidup di wilayah pesisir. Tanpa

organisasi sosial ekonomi, nelayan bekerja dan hidup sendiri, dan tidak ada yang memperjuangkan keuntungan dan melindungi mereka (Sadik, 2012).

Nelayan adalah sekelompok orang yang mengandalkan langsung hasil laut melalui penangkapan ikan dan budidaya, dan biasanya tinggal di pantai, sebuah desa yang sangat peduli dengan orang-orang yang menangkap ikan di laut dan apa yang harus dilakukan dengannya. Menangkap ikan di laut (Sinaga *et al.*, 2014).

Masyarakat nelayan tentunya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pilihan pekerjaan menjadi nelayan pekerja, tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang terbatas untuk menggunakan teknologi alat tangkap masyarakat nelayan. kemampuan menangkap ikan di laut. Nelayan adalah orang yang melakukan praktek penangkapan ikan (budaya) di laut dan tempat-tempat yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi jika seseorang menangkap ikan di daerah budidaya ikan seperti kolam, ikan, danau, sungai, maka mereka tidak dianggap sebagai nelayan. Penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut lainnya merupakan mata pencaharian utama para nelayan. Nelayan adalah sekelompok orang yang mata pencahariannya secara langsung bergantung pada hasil laut, baik melalui penangkapan ikan maupun bertani. Mereka biasanya tinggal di pantai, daerah pemukiman dekat tempat mereka berbisnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil didefinisikan secara berbeda, yaitu nelayan kecil adalah mereka yang mata pencahariannya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membedakan menurut ukuran penangkapan, tetapi di kepolisian hanya mengenal istilah nelayan, terlepas dari ukuran dan ukuran nelayan. Nelayan dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat dari kemampuan

teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. Empat tingkatan nelayan adalah:

1. Pengembangan pribadi (nutrisi). Pada umumnya nelayan pada kelompok ini masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti dayung atau sampan bermesin dan masih mengandalkan tenaga kerja utama anggota keluarga.
2. Nelayan pasca tani dicirikan oleh penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti mesin lepas pantai atau perahu motor. Pengendalian pemasangan perahu motor telah membuka lebih banyak peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di perairan yang lebih jauh dan meraup keuntungan dari hasil tangkapan karena daya tangkap yang lebih besar. Pada umumnya nelayan jenis ini selalu bekerja di daerah pesisir. Pada tipe ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang terserap cukup besar dan tidak hanya bergantung pada anggota keluarga.
3. Nelayan komersial, yaitu nelayan yang berorientasi pada peningkatan keuntungan. Ukuran perusahaan secara inheren besar dengan jumlah pekerja yang banyak dengan status yang berbeda-beda dari pekerja hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun semakin modern dan membutuhkan keahlian seseorang dalam pengoperasian kapal dan alat tangkap.
4. Nelayan industri, ciri-ciri nelayan jenis ini adalah mereka berorganisasi mirip dengan perusahaan industri-pertanian di negara maju, relatif padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada nelayan tunggal, murni, baik untuk pemilik kapal maupun awak kapal, dan produk ikan kaleng dan beku untuk ekspor

Dalam proses pembangunan, para nelayan saling terkait oleh dualisme menurut dualisme sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama ini. Dilihat dari teknologi alat tangkap yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Gustaf Ranis mendefinisikan bidang tradisional sebagai bidang yang belum tersentuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks nelayan, nelayan dapat dipahami sebagai mereka yang bergerak di bidang kelautan dengan menggunakan perahu layar tanpa motor, sedangkan yang menggunakan motor atau perahu motor adalah nelayan modern. Atau bisa dikatakan nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih kompleks dibandingkan nelayan tradisional (Pratama *et al.*, 2012).

Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat subsistem lainnya (Suyanto & Bagong, 2013).

2.2.3 Karakteristik Nelayan

Dalam Perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:

1. Pemanfaat langsung sumber daya manusia, seperti nelayan (yang pokok), pemudi daya perairan ikan di perairan pantai (dengan aring apung atau keramba), pemudi daya rumput laut/mutiara, dan petambak;

2. pengolah hasil ikan jatau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/kerupuk, ikan/tepung ikan, dan sebagainya; dan
3. penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu, dan buruh kasar (manol).

Tingkatan keragaman (heterogenitas) kelompok-kelompok sosial yang ada dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desa-desa pesisir. Desa-desa pesisir atau desa-desa nelayan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desa-desa nelayan yang sudah berkembang lebih maju dan memungkinkan terjadinya diversifikasi kegiatan ekonomi, tingkat keragaman kelompok-kelompok sosialnya lebih kompleks daripada desa-desa pesisir yang sudah berkembang biasanya dinamika sosial ekonomi lokal berlangsung secara intensif.

Di desa-desa pesisir yang memiliki potensi perikanan tangkap (laut) cukup besar dan memberikan peluang mata pencarian bagi separo atau sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau kelompok sosial masyarakat atau kelompok sosial nelayan merupakan pilar sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. Karena masyarakat nelayan berprofesi sebagai produsen perikanan tangkap, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial ekonomi lokal sangat besar. Peluang kerja di sektor perikanan tangkap ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat desa-desa lain daerah hulu yang berbatasan dengan nelayan tersebut.

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai

karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum, karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: memiliki relasi patron-klein sangat kuat. Etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis gender (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku “konsumtif” (Kusnadi, 2009).

Karakteristik masyarakat, dalam hal ini masyarakat mana saja (tanpa kecuali), dikatakan Dahrendorf bahwa ; setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan sosial yang dimana saja dan kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik dimana konflik itu juga ada di mana-mana, dan setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan yang mana setiap masyarakat juga didasarkan pada paksaan dari orang lain (Utsman, 2007).

Ekonom berpendapat bahwa kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, terutama disebabkan oleh faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan karakteristik sumber daya dan teknologi yang digunakan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan nelayan jatuh miskin.

1. (Smith, 1979) yang melakukan penelitian tentang perkembangan perikanan di berbagai negara Asia dan (Anderson, 1979) yang melakukan penelitian di negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang diterbitkan menyimpulkan bahwa imobilitas dan kekakuan kapal penangkap ikan adalah alasan utama nelayan tinggal atau berjuang dengan kemiskinan dan mereka tampaknya tidak

berusaha keluar dari kemiskinan. Ketangguhan aset disebabkan oleh sifat tangkapan yang membuat sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk penggunaan lain. Akibatnya, ketika produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak dapat mengalihkan atau melikuidasi aset tersebut. Jadi, meski produktivitasnya rendah, nelayan tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan yang praktis tidak menguntungkan.

2. (Subade & Abdullah, 1993) membuat argumen lain, yaitu bahwa nelayan bertahan di industri perikanan karena biaya kesempatan yang rendah. Menurut definisi, biaya peluang bagi nelayan adalah kegiatan ekonomi atau komersial terbaik atau kegiatan alternatif selain penangkapan ikan. Dengan kata lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dialami nelayan jika tidak menangkap ikan. Jika biaya oportunitasnya rendah, nelayan cenderung melanjutkan aktivitasnya meskipun sudah tidak menguntungkan dan produktif lagi. Juga dikemukakan bahwa biaya peluang bagi nelayan, terutama di negara berkembang, sangat rendah dan cenderung mendekati nol. Jika demikian, nelayan tidak punya pilihan selain mencari nafkah. Jadi apa yang terjadi, para nelayan tetap melaut karena hanya itu yang bisa mereka lakukan.
3. (Kusnadi, 2002) menyatakan bahwa nelayan selalu ingin hidup dalam kemiskinan karena ingin menjalani kehidupan ini (lebih menyukai cara hidup tertentu). (Subade & Abdullah, 1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih memilih untuk hidup puas dengan menangkap ikan daripada memainkan peran sebagai subjek hanya untuk meningkatkan pendapatannya. Karena gaya hidup seperti itu, apa pun yang terjadi pada keadaannya, itu tidak dianggap sebagai masalah baginya. Jalan hidup memang sulit untuk diubah. Jadi, meskipun

menurut orang lain, nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan mereka bisa merasa bahagia dalam hidup ini.

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani dalam pengelolaan atau pemanfaatan lahan untuk mencari nafkah, kata Satria. Nelayan menghadapi situasi sumber daya yang tidak terkendali ketika hasil tangkapan menurun, nelayan harus mencari lahan baru.

Nelayan dapat bertahan hidup jika didorong untuk hidup kuat dengan motto bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nelayan tradisional berjuang melawan ombak laut yang ganas saat air pasang untuk menangkap ikan. Misalnya, berdasarkan kemampuan mesin dompok saja, nelayan dapat bertahan dalam radius 500 M dari pantai dan dengan cara ini nelayan akan mendapatkan lebih banyak jika mereka menangkap ikan di pantai (pantai) dalam radius 200 M, di mana ikan langka.

Menurut (Kusnadi, 2003), berdasarkan stratifikasi masyarakat nelayan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai jenis nelayan, yaitu:

1. Nelayan kaya A, yaitu nelayan yang memiliki perahu untuk menyewa nelayan lain tanpa dirinya, harus ikut bekerja.
2. Nelayan kaya B, seorang nelayan yang memiliki perahu tetapi bekerja sebagai awak kapal.
3. Nelayan menengah, yaitu nelayan yang memiliki perahu sendiri tanpa mempekerjakan tenaga kerja bukan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan penghasilan utama dari kegiatannya sebagai nelayan.

4. Nelayan miskin, Nelayan yang perlu menambah pekerjaan lain untuk dirinya sendiri atau istri dan anak-anaknya karena pendapatan dari perahu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan pekerja. Mereka merupakan penyumbang utama produksi perikanan nasional. Meskipun demikian, nelayan sebagai produsen tidak menerima sebagian besar pendapatannya, karena status sosial mereka dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif masih kecil. Toko ikan besar dan perantara adalah yang paling bahagia. Para pedagang ini sebenarnya adalah penguasa ekonomi desa nelayan. Nelayan terus melaut dalam situasi seperti itu tanpa tahu bagaimana menghentikannya.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya. Sebagai besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, mengagantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial,
2. keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha,
3. kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada,
4. kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,
5. degradasi sumberdaya lingkungan, baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan
6. belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilat utama pembangunan nasional.

Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumberdaya lingkungan, karena itu penyelesaian persoalan kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat intergralistik. Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, pilihan ini benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian memang sulit dilakukan, tetapi harus di tempuh untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia yang memang terbatas (Kusnadi, 2009).

Hal ini telah menyebabkan banyak masalah sosial ekonomi yang serius di masyarakat nelayan. Namun, kendala struktural pada kegiatan perdagangan bukan hanya satu-satunya faktor yang menyebabkan masalah sosial bagi nelayan, tetapi juga meningkatnya kekurangan stok ikan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut,

serta keterampilan dan kualitas penangkapan ikan yang buruk. stok, perlindungan politik yang tidak memadai dan dukungan untuk lembaga pengembangan komunitas nelayan masih menjadi penyebab masalah.

Menurut (Manggabarani, 2016) Kondisi sosial masyarakat nelayan di pengaruhi oleh kondisi umur, Pendidikan dan Pengalaman kerja :

1. Umur akan mempengaruhi tingkat kemampuan fisik dan cara berfikir. Tingkat umur berpengaruh pada diri nelayan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pada umumnya nelayan yang berumur muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang lebih besar dari pada nelayan yang berusia tua. Nelayan muda juga cepat menerima hal-hal yang baru dianjurkan. Hal ini disebabkan karena nelayan yang berusia muda lebih berani menanggung resiko.
2. Pendidikan pada umumnya mempengaruhi cara berfikir nelayan, dimana semakin tinggi pendidikan semakin cepat pula menerima inovasi –inovasi baru.
3. Pengalaman kerja responden sangat mempengaruhi pekerjaannya semakin banyak pengalaman yang dimiliki semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan dalam melakukan pekerjaannya.

Kemerosotan kesejahteraan sosial nelayan terutama dirasakan di desa-desa pesisir dimana penangkapan ikan yang berlebihan di perairan menyebabkan fluktuasi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, membuat mereka tidak aman dan terkadang menurun. Dalam situasi seperti itu, rumah tangga nelayan selalu menghadapi tiga masalah yang sangat serius dalam hidup mereka. Mereka adalah

1. Berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
2. Kebutuhan pendidikan anak yang tidak memadai, dan
3. Terbatasnya akses terhadap asuransi.

Ketiga pendekatan di atas merupakan kebutuhan hidup paling pokok rumah tangga nelayan dan seringkali tidak terpenuhi secara optimal. Melihat realitas kehidupan tersebut, sangat sulit untuk merumuskan dan meningkatkan sumber daya masyarakat nelayan sedemikian rupa sehingga mereka siap secara optimal untuk mengelola potensi stok laut dan pesisir yang ada. Minimnya atau minimnya kapasitas kreatif masyarakat nelayan untuk mengelola status sosial ekonomi daerah mengakibatkan keterbelakangan jangka panjang yang membantu tercapainya tujuan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sektor. Untuk itu perlu dipikirkan alternatif solusi strategis untuk mengatasi permasalahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Dalam hal ini, program jaminan sosial yang dirancang dengan baik merupakan strategi yang harus diperhatikan untuk mengatasi krisis sosial ekonomi yang melanda kehidupan masyarakat nelayan.

Negara dan pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk mengembangkan sektor perikanan dan memperkuat ekonomi produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun hasilnya belum optimal. Sejak awal 1970-an hingga saat ini, memastikan bahwa semangat kebijakan nasional diterapkan pada pembangunan perikanan memprioritaskan peningkatan produksi, penipisan sumber daya air, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, dan kemiskinan. Membawa ketimpangan sosial. Kebijakan tersebut, dengan atau tanpa kebijakan komparatif tentang bagaimana masyarakat nelayan harus menjaga kelestarian stok laut. Memang, kebijakan ini menawarkan keuntungan ekonomi bagi nelayan bermodal besar dan bervolume rendah, tetapi pada akhirnya semua nelayan di industri yang berbeda menghadapi masalah yang sama.

Demikian pula kebijakan yang diterapkan selama ini untuk memperkuat finansial masyarakat nelayan. Seperti halnya penangkapan ikan, arahan ini hanya memberi makan nelayan dan tidak menjamin keberlanjutan apa yang terjadi jika alat tangkap rusak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan lemahnya dukungan politik bank umum untuk pembayaran pinjaman berbunga rendah yang berkelanjutan dan konsisten kepada komunitas nelayan. Pada dasarnya, dukungan ini diperlukan bagi nelayan untuk menjaga kelangsungan industri perikanan mereka.

Gejala fluktuatif yang digambarkan di atas mencerminkan kurangnya payung nasional untuk kebijakan pemberdayaan, dan keputusan tingkat menteri untuk memberikan ketenangan pikiran bagi lembaga perbankan ketika bekerja dengan nelayan dalam pemberian pinjaman, yang menjadi referensi bagi masyarakat.

Selain itu, kurangnya pihak-pihak yang dapat berkontribusi secara penuh dan sungguh-sungguh dalam membangun komunitas nelayan memungkinkan komunitas nelayan mengembangkan strategi kemandirian untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya, berdasarkan peningkatan kapasitas stok. Wujud dari sikap otonomi nelayan diwujudkan dalam pembangunan institusi sosial seperti simpan pinjam, arisan, dan jejaring sosial, yang memobilisasi kapasitas sumber daya ekonomi kolektif dalam hubungan timbal balik dan komunitas nelayan.

Jaringan Klien Pembina merupakan wadah dan sarana penyediaan sumber daya jaminan sosial tradisional untuk menjamin kelangsungan hidup nelayan. Kekuatan hubungan patron-pelanggan ini adalah

1. Nelayan pemilik dan nelayan pekerja,

2. Nelayan pemilik dan kapitalis usaha (nelayan/tengkulak),
3. Nelayan pemilik dan toko-toko yang memenuhi kebutuhan hidup pemilik dan kebutuhan perikanan.

Ketika hasil tangkapan nelayan diberikan dalam bentuk ikan, hubungan *customer-to-customer* antara nelayan yang bekerja dan nelayan biasanya menjadi sengit.

2.2.4 Pendapatan Masyarakat Nelayan

Karakteristik sosial ekonomi wilayah pesisir pada umumnya bermata pencaharian di sektor perikanan dan kelautan seperti nelayan, budidaya, penambangan pasir dan transportasi laut. Sebagian besar dari mereka masih rendah dalam hal tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan kondisi lingkungan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih kurang tertata dan terlihat petaka.

Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah, tekanan jangka panjang terhadap stok pesisir akan semakin sedikit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan sebagai masyarakat pesisir seringkali tersisih dari pembangunan karena prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus pada sektor pertanian atau pertanahan. Nasib masih bergantung pada hasil laut. Kehidupan nelayan masih sederhana dengan pola mata pencaharian yang terampil secara tradisional. Selain peralatan mereka jauh tertinggal, mereka juga melaut di daerah penangkapan ikan yang terbatas di wilayah pesisir. Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi, sosial (terutama dalam hal akses pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan secara kultural tertinggal dari kelompok

masyarakat lainnya. Keadaan masyarakat pesisir dan nelayan di berbagai daerah umumnya ditandai dengan adanya beberapa ciri, seperti tamat sekolah dasar dan lemahnya fungsi keberadaan kelompok usaha.

Masyarakat nelayan sebagai masyarakat pesisir seringkali tersisih dari pembangunan karena prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus pada sektor pertanian atau pertanahan. Kehidupan seorang nelayan yang nasibnya masih bergantung pada hasil laut berada pada tataran sederhana dengan pola mata pencaharian teknik tradisional. Selain alat tangkap yang jauh tertinggal, mereka juga melaut di daerah penangkapan ikan yang terbatas di wilayah pesisir. Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi, sosial (terutama dalam hal akses pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan secara kultural tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya. Keadaan masyarakat pesisir atau nelayan di berbagai daerah umumnya ditandai dengan adanya beberapa ciri, seperti lemahnya fungsi keberadaan sekolah dasar dan kelompok usaha.

Seperti yang kita ketahui bersama, nelayan bukanlah satu kesatuan. Mereka termasuk beberapa kelompok yang dalam hal kepemilikan alat tangkap dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: nelayan pekerja, nelayan nahkoda, dan nelayan perorangan. Nelayan yang bekerja adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Sedangkan nahkoda adalah nelayan yang alat tangkapnya dioperasikan oleh orang lain. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki sarana penangkapan ikan sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam kegiatannya.

Kondisi yang dialami nelayan tentu memprihatinkan, karena nelayan merupakan andalan pengelolaan perikanan di Indonesia. Dalam konteks pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, menyebabkan daratan di benua itu

semakin menyusut, mata pencaharian nelayan menjadi tumpuan harapan untuk pembangunan selanjutnya. Untuk itu, ke depan perlu secara bertahap mendorong masyarakat untuk memindahkan kegiatan ekonomi ke laut.

Dari ketiga tipe nelayan tersebut, pada umumnya nelayan nahkoda tidak kalah. Kemiskinan cenderung bersifat individu nelayan dan nelayan. Karena dua jenis ternak ini merupakan mayoritas, citra kemiskinan telah melekat pada kehidupan nelayan. Citra kemiskinan nelayan sebenarnya merupakan sebuah ironi, mengingat Indonesia memiliki laut yang sangat luas, lebih besar dari luas daratan. Di laut terdapat berbagai sumber daya dengan potensi ekonomi tinggi yang perlu dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Pendapatan adalah jumlah kegunaan yang dapat dihasilkan melalui usaha. Pada hakikatnya jumlah uang yang diterima oleh seorang produsen (nelayan/petani ikan) untuk produk yang dijualnya tergantung dari jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen, jumlah produk yang dipasarkan dan biaya-biaya untuk menggerakkan produk ke pasar (Wasak, 2012).

Pendapatan dan penerimaan keluarga adalah seluruh pendapatan dan penerimaan yang diterima oleh seluruh anggota rumah tangga ekonomi. Pendapatan itu sendiri terdiri atas:

1. Pendapatan dari upah atau gaji, yang mencakup upah atau gaji yang diterima seluruh rumah tangga ekonomi yang bekerja sebagai buruh dan imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan untuk suatu perusahaan atau majikan atau instansi tersebut, baik uang maupun barang atau jasa.

2. Pendapatan dari hasil usaha seluruh anggota rumah tangga yang berupa pendapatan kotor, yaitu selisih nilai jual barang dan jasa yang diproduksi dengan biaya produksinya.
3. Pendapatan lainnya, yaitu pendapatan di luar upah atau gaji yang menyangkut usaha dari :
 1. Perkiraan sewa rumah milik sendiri;
 2. Bunga, deviden atau royalti, sewa atau kontrak, gedung, bangunan, peralatan dan sebagainya;
 3. Buah hasil usaha (hasil usaha sampingan yang dijual);
 4. Pensiunan dan klaim asuransi jiwa;
 5. Kiriman famili atau pihak lain secara rutin, ikatan dinas, beasiswa, dan sebagainya.

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu : pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan yaitu berasal dari usaha penangkapan ikan sedangkan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah (Kadhita *et al.*, 2014).

Beberapa definisi yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu:

1. Penerimaan tunai, yaitu nilai uang yang diterima dari penjualan produk
2. Pengeluaran tunai, yaitu jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa
3. Pendapatan tunai, yaitu selisih antar penerimaan tunai dengan pengeluaran tunai
4. Penerimaan kotor, yaitu produksi total usaha dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual

5. Pengeluaran total usaha, yaitu nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan dalam produksi termasuk biaya yang diperhitungkan
6. Pendapatan bersih usaha, yaitu selisih antara penerimaan kotor dan pengeluaran total usaha.

(Nugroho & Rohman, 2012).

Pendapatan nelayan adalah selisih antara penerimaan (TR) dan semua biaya (TC). Jadi $Pd = TR - TC$. Penerimaan nelayan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh (Y) dengan harga jual (PY). Biaya nelayan biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu tetap (*Fixed Cost*) dan biaya tidak tetap (*Variavle Cost*). Biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Biaya variable (VC) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, contohnya biaya untuk tenaga kerja. Total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya tetap jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC), maka $TC = FC + VC$ (Az Nasution, 2014).

Pendapatan nelayan merupakan sumber utama para nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Menurut (Jamal, 2014) mengutarakan bahwa “pendapatan (*revenue*) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”. Pendapatan nelayan bersumber dari pendapatan bersih hasil melaut. Artinya pendapatan yang sudah tidak di potong oleh biaya untuk melaut.

Tingkat pendapatan nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor harga ikan memiliki pengaruh paling dominan bila dibandingkan dengan modal kerja, jam

kerja melaut, dan teknologi. Harga ikan yang rendah dan produksi yang terbatas menyebabkan pendapatan nelayan tradisional lebih rendah dibandingkan dengan kapal motor besar yang jumlah produksinya lebih besar (Fadilah *et al.*, 2014).

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Terdapat beberapa klasifikasi pendapatan yaitu:

1. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diterima oleh nelayan
2. Pendapatan pendapatan bersih yaitu pendapatan pribadi dikurangi biaya yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan bersih.
3. Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

(Sukirno, 2006).

Pendapatan bersih adalah suatu jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk dibelanjakan atau dikonsumsi. Besarnya pendapatan pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya total yang harus di keluarkan. Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu:

1. Pendapatan dari gaji dan upah, yang merupakan balas jasa dari kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji seseorang secara teoretis tergantung dari produktivitasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu; keahlian (*skill*) yakni seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan

seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

2. Pendapatan dari asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif pertama, asset finansial (*financial asset*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan. Kedua, asset bukan finansial seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.
 3. Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa input yang diberikan tetapi transfer yang diberikan oleh pemerintah.
- (Sobri, 1999).

Menurut teori (Friedman, 2007) dalam (Mankiw, 2012), bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen dapat diartikan yaitu:

1. Pertama, pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai contoh adalah pendapatan, upah, dan gaji.
2. Kedua, pendapatan yang diperoleh dan hasil semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

Pendapatan menekankan pada perwujudan balas jasa dari partisipasi seseorang dalam satu kegiatan produksi dimana tergambar pada sumbangan faktor-faktor produksi atas nilai tambah (*value added*) pada tingkat output tertentu. Nilai tambah inilah yang merupakan pokok utama dari balas jasa yang selanjutnya disebut

pendapatan. Pendapatan tersebut dipilih menurut jangka waktu tertentu sehingga arti praktisnya nampak, misalnya satu bulan, dan lain sebagainya. Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang mengikut serta kan modal atau keterampilan mempunyai produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih besar (Winardi, 1988).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan pada pasal 1 butir 5 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan bukan budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkan. Undang-Undang no. 45 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang no. 31 tahun 2004. Salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Perubahan atas UU no. 31 tahun 2004 adalah bahwa UU yang terdahulu belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Pengklasifikasian perikanan menurut skala kecil atau besar, perikanan pantai atau lepas pantai, artisanal atau komersial, tradisional atau modern hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena dimensi tolak ukurnya yang cukup luas. Sering kali pengelompokan berdasar atas ukuran kapal, ukuran tonase mesin kapal, jenis alat tangkap, jarak wilayah penangkapan dari tepi pantai.

Berdasarkan teknik dan alat-alat penangkapannya, nelayan tradisional adalah nelayan yang masih mempertahankan cara penangkapannya dengan menggunakan kapal tanpa motor (KTM), tanpa inovasi teknologi, tanpa dukungan modal yang kuat, tanpa kelembagaan usaha yang mapan, cenderung bersifat subsistem, dan telah menekuni aktifitas tersebut secara turun temurun. Berbeda halnya dengan nelayan modern, teknik penangkapannya mengadopsi perkembangan teknologi, seperti kapal motor hingga ke teknologi citra satelit misalnya. Dukungan modal dan kelembagaan usahanya mapan, serta ciri-ciri subsistem telah hilang.

Secara umum nelayan-nelayan di Paciran mengelompokkan diri berdasarkan alat tangkap dan armada yang digunakan. Pengelompokan menurut alat tangkap ini biasa dilakukan karena berkolerasi terhadap pendapatan. Beberapa studi membuktikan bahwa perubahan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat hasil tangkapan nelayan. Salah satunya adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Adnan, 2006) membuktikan bahwa produksi hasil tangkapan ikan paling besar dicapai oleh kapal motor, kemudian oleh perahu motor tempel, dan terakhir diikuti perahu tradisional. Pendapatan nelayan yang memakai perahu tradisional dengan perahu motor tempel juga memiliki perbedaan yang nyata. Dari hasil wawancara dengan nelayan-nelayan di Paciran, mereka melakukan pengelompokan nelayan berdasarkan alat tangkap dan armada yang digunakan, yaitu:

1. Nelayan Juragan

Nelayan Juragan adalah nelayan yang menggunakan kapal berkekuatan 1 – 10 GT. Wilayah tangkap nelayan kecil 3-5 GT hanya berkisar 5-10 mil dari pinggir

pantai. Nelayan Juragan memiliki Buruh Atau ABK yang berjumlah 3-5 awak kapal.

2. Nelayan Kecil

Nelayan Kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal kecil biasa juga di sebut nelayan rajungan karena nelayan kecil biasanya hanya menangkap rajungan. Alat tangkapyang di gunakan adalah wuwu dan tidak mempunyai ABK

3. Nelayan Buruh/ABK

Nelayan adalah nelayan yang bekerja untuk juragan jam kerja dari nelayan buruh yaitu mengikuti juragan yang berkisar antara 7-8 jam per trip.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan terutama nelayan, hal ini disebabkan karena sebagian besar kebutuhan melaut adalah BBM (Mulyadi, 2007:). Kebutuhan BBM bagi nelayan ibarat jantung bagi manusia, kebutuhan BBM menempati 70% dari biaya yang dikeluarkan. Sejauh ini belum terdapat energi alternatif bagi nelayan selain BBM (solar). Nelayan melakukan penghematan BBM dengan cara mencampur solar dengan minyak tanah, oli atau zat lain yang mengandung persentasenya tetap lebih kecil dibandingkan solar yang digunakan. Pengoplosan bahan bakar tersebut akan memperpendek usia mesin perahu nelayan (Gumilang & Perdana, 2010).

Faktor penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Karena dapat mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk membeli setiap liter BBM dalam melaut. Banyaknya penggunaan BBM juga akan berpengaruh terhadap

jarak tempuh melaut yang semakin jauh dan waktu penangkapan yang semakin lama maka semakin besar kemungkinan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah atau akan semakin meningkat sehingga memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan penangkapan yang dilakukan didekat pantai.

2.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan (Poerwadarminta, 2003).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya

Menurut Bappenas Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan/tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membuat beberapa bidang prioritas sebagai tolak ukur kesejahteraan rakyat secara keseluruhan disamping bidang lainnya. Bidang-bidang tersebut terbagi menjadi empat indikator yaitu pendidikan, perumahan, dan kesehatan (Ramdhani *et al.*, 2015).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, dia menyimpulkan bahwa factor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industry, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta (Kakisina, 2011).

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang baik bagi masyarakat, sehingga dapat berkembang dan menyelenggarakan fungsi sosial yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009, Pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan adalah hal yang subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu dengan pedoman, tujuan dan gaya hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda pada penentu.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Sunarti, 2012).

Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pratama *et al.*, 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang

memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Wijayanti, 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Widyastuti, 2012).

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (A. Imron, 2012).

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif;
2. adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan
3. adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

(A. Imron, 2012).

Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2005).

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan social lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan inti dari pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga ditempatkan lebih baik untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk mengukur masyarakat nelayan di Indonesia, diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat. Indikator dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dimensi sosial dan ekonomi, serta keamanan yang dapat dilihat pada keduanya. Masalah kesejahteraan selalu dikaitkan dengan konsep kebutuhan, masyarakat nelayan/rumah tangga nelayan akan memenuhi kebutuhannya sampai terpenuhi dan kemudian sejahtera.

Desa Paciran merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai petani, buruh tani, perajin, pegawai, pegawai pedagang dan tukang ojek. orang bekerja untuk disewa, sementara hanya sebagian kecil yang menjadi pengemudi dan pemilik. Nelayan Desa Paciran memiliki riwayat hidup yang ditandai dengan kemiskinan.

Berdasarkan hasil survey awal (studi sebelumnya) dengan observasi, status kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat jauh tertinggal, seperti perumahan yang tidak berpenghuni, kondisi sanitasi yang buruk dan air minum adalah kondisi fasilitas perikanan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta rendahnya pemanfaatan iptek, rendahnya permodalan nelayan serta karakteristik sosial budaya nelayan yang masih belum kondusif bagi kemajuan bisnis mereka.

Kehidupan dan mata pencaharian nelayan bergantung pada hasil laut. Realitas menunjukkan bahwa laut sangat tidak terduga bagi mereka dan oleh karena itu menghasilkan pendapatan yang tidak dapat mereka prediksi. Kehidupan nelayan selalu diperlihatkan dengan ketertinggalan baik dari segi sarana penghidupan maupun cara berpikir dan sikapnya yang masih tradisional. Gambaran masyarakat nelayan di atas juga terjadi pada masyarakat nelayan Desa paciran Kecamatan Paciran Bupati Lamongan hal ini menjadi dilema dalam kehidupan nelayan. Melihat kondisi kehidupan nelayan, peneliti tertarik untuk melihat tingkat masyarakat nelayan Desa paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan konteks masalah di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tingkat ekonomi masyarakat pesisir yang semakin kurang sejahtera.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, yang memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang baik, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang antar anggota. dan antara keluarga, masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 2014).

Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan, sandang, papan, air bersih, serta kemampuan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, mendukung kualitas hidup Anda. hidup tidak lagi miskin, jahil, tak kenal takut, tanpa rasa khawatir, sehingga hidup saya aman dan tidak terluka baik secara materil maupun spiritual (Fahrudin, 2012).

Kesejahteraan sering diartikan secara luas sebagai kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat baik pada tingkat individu atau keluarga dan kelompok masyarakat. Kesejahteraan dapat diekspresikan melalui kemampuan keluarga dalam mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, kesejahteraan adalah terpenuhinya segala kebutuhan, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Prabawa, 1998).

Kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan kehidupan sosial, material dan spiritual yang membawa rasa aman, kesusilaan, dan kedamaian lahir batin, membantu setiap warga negara untuk melakukan upaya yang terbaik untuk

memenuhi kebutuhannya baik fisik, mental dan sosial. , keluarga dan masyarakat (Rambe & Arimani, 2011).

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep harkat dan martabat manusia, yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu:

1. keamanan,
2. kebahagiaan,
3. kebebasan, dan
4. identitas.

Variabel ini adalah hal-hal yang digunakan untuk melihat seberapa baik menciptakan rasa aman, kebebasan, dan identitas seseorang untuk memenuhi kebutuhannya (Nasikun, 1993).

Menurut (Fahrudin, 2012) Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

1. Dengan mempertimbangkan kualitas materi kehidupan, seperti kualitas rumah, bahan pangan.
2. Dengan mengkaji kualitas kehidupan dari sudut pandang materi, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam.
3. Dengan memeriksa kualitas hidup dari sudut pandang spiritual, seperti lembaga pendidikan, lingkungan budaya.
4. Pemeriksaan kualitas hidup dari sudut pandang spiritual, seperti moralitas, etika, penyesuaian harmoni.

(Fahrudin, 2012).

Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa ukuran kesejahteraan ditinjau dari aspek material, fisik, mental dan spiritual. Oleh karena itu, tidak hanya dilihat dari kebutuhan global tanpa mempengaruhi kebutuhan lainnya.

Pemahaman pemerintah tentang kesejahteraan keluarga di Indonesia selama ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

1. Pertama, kategori keluarga kurang mampu adalah tipe keluarga yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dari segi kebutuhan hidup, nasi dan pakaian, makanan dan tempat tinggal.
2. Kedua, tipe keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera adalah seperti keluarga dengan dua atau tiga anak yang berpendidikan baik, memiliki pendapatan yang stabil, peduli dengan masalah kesehatan lingkungan, kebal terhadap penyakit, memiliki tempat tinggal dan tidak membutuhkan bantuan makanan dan pakaian.

(Suyoto, 2004)

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2013) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator antara lain:

1. Kependudukan
2. Pendidikan
 - a. Angka Partisipasi Sekolah.
 - b. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan
 - c. Angka buta huruf.
3. Kesehatan

- a. Angka Kesakitan.
 - b. Penolong Kelahiran.
 - c. Angka Harapan Hidup.
4. Fertilitas dan Keluarga Berencana
 5. Pola Konsumsi
 6. Ketenagakerjaan Status pekerjaan menjadi 7 (macam), yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga.
 7. Perumahan

Kesejahteraan manusia dapat diekspresikan melalui kemampuan mengakses pendidikan, serta kemampuan menggunakan pendidikan itu untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup. Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan formal dan nonformal. Kedua jalur pendidikan ini mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Pencapaian pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan suatu penduduk dimana tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan orang-orang yang terampil dan produktif untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan penduduk (BPS Sumut, 2013). Dengan demikian, pendidikan akan menentukan kaya atau tidaknya seseorang, artinya seseorang memiliki keterampilan dan produktivitas untuk menciptakan pendapatan yang tinggi guna memenuhi kebutuhan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tingkat kesejahteraan secara langsung dipengaruhi oleh pendapatan. Perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan dalam keluarga,

tingkat pengeluaran keluarga dengan tanggungan tinggi tidak sama dengan keluarga tanggungan kecil. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima kepala rumah tangga selama satu bulan bagi keluarga untuk menghidupi diri sendiri. Pendapatan digunakan sebagai metrik untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang dengan melihat pendapatan per kapita/bulanan keluarga.

Pendapatan sebagai semua penerimaan baik berupa uang maupun barang, baik yang berasal dari luar maupun dari hasil sendiri dengan cara dinilai dengan harga yang berlaku pada saat itu dalam bentuk uang. Pendapatan dan pendapatan memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh seseorang mempengaruhi pola pergerakan hidup dan interaksinya dengan masyarakat, karena besar kecilnya pendapatan mempengaruhi daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, semakin besar kemungkinan mereka memiliki aset yang memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga (Utomo, 2013).

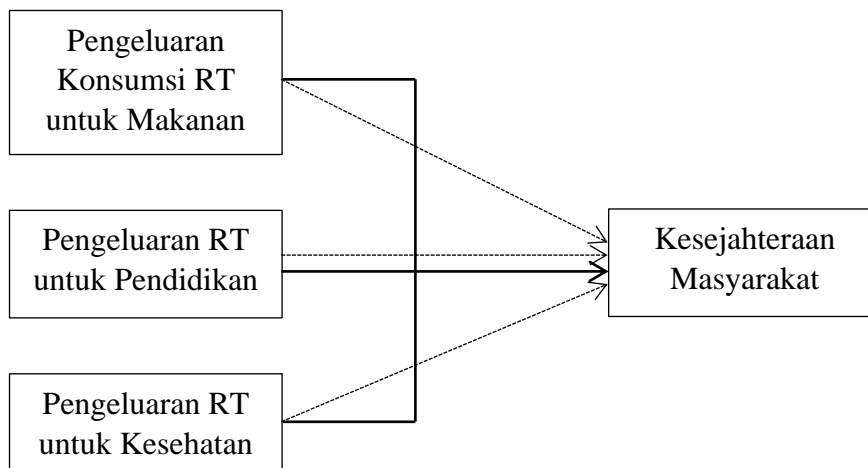
Senada dengan itu, BPS Sumatera Utara (2013) menjelaskan bahwa tingkat rumah tangga sebenarnya dapat diukur dari tingkat pendapatan relatif terhadap kebutuhan minimum untuk hidup yang baik. Mengingat pentingnya perubahan sosial ekonomi ini dalam hal pendapatan, (Sumardi & Evers, 1982) berpendapat bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau seluruh pendapatan, baik berupa uang maupun harta benda, yang diperoleh dari pihak lain atau diri mereka sendiri.

Keluarga sejahtera berarti segala macam kebutuhan dapat terpenuhi secara seimbang dan berkesinambungan tanpa terputus. Untuk melihat , kita bisa melihat

langkah-langkah yang dilakukan BKKBN 201, yang meliputi indikator-indikator untuk menentukan . Ada 5 langkah untuk menentukan tingkat kemakmuran, yaitu kemakmuran prasejahtera, kesejahteraan I, kesejahteraan II, kesejahteraan III dan kesejahteraan III+.

Suatu rumah tangga dapat diklasifikasikan sejahtera jika pengeluarannya untuk kebutuhan dasar sama atau lebih rendah dari pengeluarannya untuk kebutuhan non-dasar. Sebaliknya, rumah tangga dengan porsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang lebih tinggi daripada kebutuhan non-dasar dapat diklasifikasikan sebagai rumah tangga berstatus rendah. adalah suatu tatanan kehidupan dan kehidupan sosial, material dan spiritual, diikuti oleh rasa aman, kesusilaan dan ketenangan pikiran, rumah tangga dan masyarakat, fisik dan mental, Memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha memenuhi fisik yang terbaik. Kebutuhan spiritual dan sosial bagi diri, diri, rumah tangga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Rambe & Armaini, 2004).

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membantu orang memenuhi kebutuhan mereka di beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak-anak, kesehatan, penyesuaian sosial, rekreasi, standar hidup dan hubungan sosial. Pelayanan perlindungan sosial yang menjadi perhatian utama individu, kelompok, masyarakat dan penduduk secara keseluruhan; Pelayanan ini meliputi pemeliharaan atau perawatan, pengobatan dan pencegahan (Adelfina & Jember, 2016).



Keterangan :

—————> Pengaruh secara simultan

-----> Pengaruh secara parsial

Gambar 2.1 Diagram Konsep Kesejahteraan (Ndakularak *et al.*, 2014)

a. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Makanan

Pengeluaran rumah tangga untuk makanan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan atau dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan seperti membeli beras, sayur-sayuran, minyak goreng, susu dan lain-lain.

b. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan

Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk biaya pendidikan seperti biaya SPP, biaya buku, pakaian sekolah dan sepatu.

c. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk biaya kesehatan seperti biaya pemeriksaan kesehatan dan pembelian obat-obatan.

d. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh United Nation Development Programme (2004) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Harliyani & Haryadi, 2016). Dalam proses mencapai tujuan pembangunan, ada empat komponen yang harus diperhatikan

dalam pembangunan manusia (UNDP, 2004). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Konsep pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat komponen diatas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan

kemampuan manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu: pengembangan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas (Sulaiman, 2012).

UNDP memperkenalkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan HDI/IPM. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM, terbagi dalam empat golongan 1) $IPM < 60$ (rendah), 2) $60 \leq IPM < 70$ (sedang/menengah), 3) $70 \geq IPM < 80$ (tinggi), dan 4) $IPM \geq 80$. Adapun indikator yang digunakan untuk pengukuran IPM menurut UNDP dan BPS adalah sebagai berikut :

a. Indeks Harapan Hidup atau Indeks Kesehatan

Indeks harapan hidup merupakan indikator yang mengukur suatu kesehatan dalam wilayah tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang atau sekelompok orang maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan yang tercermin dalam wilayah tersebut juga tinggi. Orang yang harapan hidupnya tinggi maka dapat bertahan dalam umur yang panjang dan dalam keadaan sehat. Perhitungan baik dari UNDP dan metode baru yang dikeluarkan BPS masih tetap menggunakan komponen Angka Harapan Hidup dalam perhitungannya (BPS, 2018).

b. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan indikator yang mengukur tingkat pendidikan penduduk dengan melihat seberapa jauh masyarakat mampu memanfaatkan

sumber daya guna mencerdaskan warganya. Indikator yang digunakan dalam indeks pendidikan yaitu melihat angka melek huruf dan lamanya sekolah. Akan tetapi dalam perhitungan IPM dengan metode baru indikator yang diukur berubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata – rata Lama Sekolah (RLS) (BPS, 2017).

c. Indeks Pendapatan atau Indeks Pengeluaran Indeks

Pendapatan atau Indeks Kemampuan konsumsi masyarakat adalah indikator yang mengukur seberapa besar kemampuan masyarakat dalam membeli di suatu wilayah. Pada tolok ukur yang dibuat UNDP, komponen yang digunakan untuk indeks ini adalah Produk Domestik Bruto perkapita sedangkan pada metode baru yang dikeluarkan oleh BPS komponen yang digunakan adalah Produk Nasional Bruto perkapita (BPS, 2017).

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Lamongan Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lamongan adalah 73,12 pada tahun 2021 ini menunjukkan nilai IPM di Lamongan tergolong tinggi.

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur berdasarkan harapan

lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.

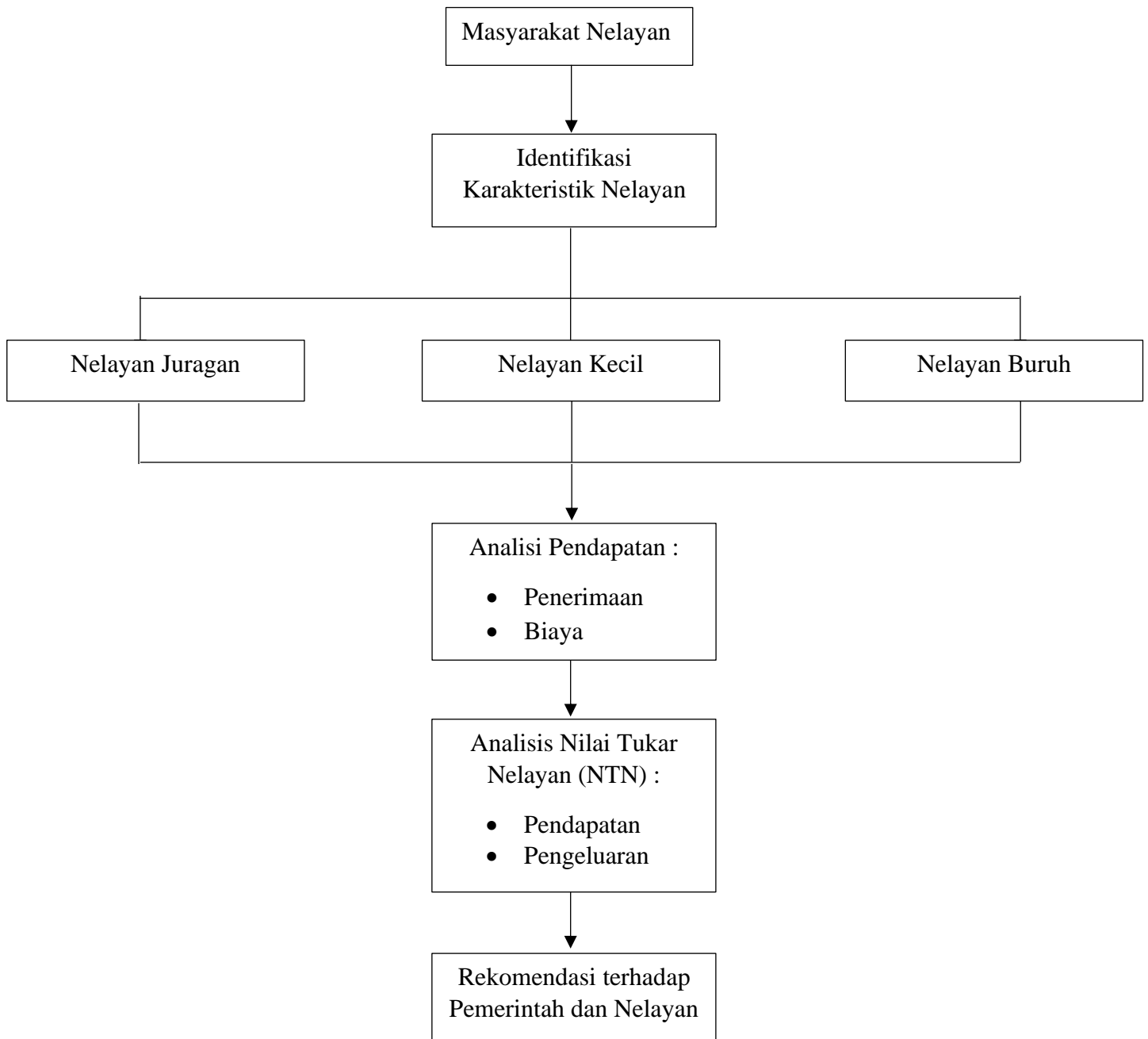
Berdasarkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar dari konsep pembangunan sumber daya manusia, maka perlu penanganan yang intensif oleh pemerintah dalam pengelolaanya. Dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut terhadap aspek lainnya, menunjukkan bahwa taraf baik dalam penanganan ketiga aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan menfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, mampu memberikan dampak positif terhadap aspek lainnya.

Peranan pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi membangun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya yang berkualitas, mempunyai keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa besar keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Keadaan masyarakat nelayan di Desa Paciran sangat mengkhawatirkan sebab keadaan ini di sebabkan oleh keterbatasan modal dan polah hidup nelayan yang kurang di perhatikan. Dimana keadaan nelayan dapat diidentifikasi dengan melihat permasalahan nelayan yang ada di desa bogak dari sosial ekonomi masyarakat nelayan, dan di pengaruhi oleh analisis sosial dan ekonomi terhadap

kesejahteraan nelayan di Desa Bogak dari faktor tersebut akan dihasilkan rekomendasi yang akan bermamfaat bagi nelayan. Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian